

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

ABSTRAK

Rahmah Tika Saufi, No BP. 1410842026, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019, Dibimbing oleh: Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA dan Dr. Syamsurizaldi S.IP, S.E, M.M. Skripsi ini terdiri dari 211 halaman dengan 7 buku teori, 5 buku metode, 6 skripsi dan 6 dokumen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap semua orang atau masyarakat untuk meperoleh informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan Informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah (1) Kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki standar dan sasaran yang jelas namun belum dijalankan sesuai dengan standar yang ada sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai (2) Sumberdaya manusia, finansial dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan belum memadai (3) Hubungan antar organisasi belum berjalan dengan baik (4) Dukungan kondisi sosial, ekonomi dan politik masih lemah terhadap pelaksanaan kebijakan

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, PPID*

ABSTRACT

Rahmah Tika Saufi, No BP. 1410842026, Implementation of Public Information Disclosure Policy in Padang Panjang City, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2019, Supervised by: Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA and Dr. Syamsurizaldi S.IP, S.E, M.M. This thesis consists of 211 pages with 7 theory books, 5 method books, 6 theses and 6 documents.

Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness guarantees all people or communities to obtain information in order to increase community participation in the administration of the state. This law expressly mandates public bodies to disclose information relating to their institutions, policies produced and activities carried out, including financial conditions and budget use. This thesis discusses how the implementation of public information disclosure policies in the city of Padang Panjang. The formulation of the problem in this study is How to Implement the Public Information Openness Policy in the City of Padang Panjang. This study aims to identify policies regarding public information disclosure and describe how the implementation of public information disclosure policies in the City of Padang Panjang.

The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used are through interviews, observation and documentation. The selection of informants was conducted using a purposive sampling technique. Data validity uses source triangulation. Data analysis is done through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the implementation of public information disclosure policies in the City of Padang Panjang from the policy implementation theory proposed by Van Meter and Van Horn are (1) Public information disclosure policies have clear standards and targets but have not been implemented in accordance with existing standards so that the objectives policies cannot yet be achieved (2) Human, financial and infrastructure resources in implementing policies are inadequate (3) Relations between organizations have not gone well (4) Support of social, economic and political conditions is still weak in implementing policies.

Keywords: *Implementation, Public Information Openness Policy, PPID*